



ANALISIS PERAN PERPUSTAKAAN UMUM SEBAGAI RUANG PUBLIK DARI PERSPEKTIF TEORI SOSIAL *PUBLIC SPHERE* JURGEN HABERMAS

Septevan Nanda Yudisman

Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Imam Bonjol Padang

septevannanda@gmail.com

ABSTRACT : Public libraries play a uniquely important role in an industrial neutral society, libraries provide information and differing views on a scene. The public can find out without coercion about the latest issues that concern them. This invaluable role and provision of fresh ideas is perhaps the greatest service to society that libraries provide and that no other type of institution can fulfill. Through libraries, people can empower themselves by obtaining a variety of information in accordance with the needs of their profession and their respective fields of work. Public space is inseparable from the ideas carried by a famous philosopher in Germany, namely Jurgen Habermas. The idea of public space is an idea that he popularized, that the public space is a medium for communicating information and views. As depicted in England and France, people meet, chat, discuss about new books published or new works of art being created. The public space is a medium for communicating information and views are very relevant to the role of the library as a medium of communication between authors through books or their writings and readers. In other words, the library is one of the communication media as expressed by Habermas regarding public space.

Keywords : Public Library, Public Space, Jurgen Habermas.

ABSTRAK : Perpustakaan umum memainkan peranan penting yang unik didalam masyarakat industri netral, perpustakaan menyediakan informasi dan perbedaan pandangan di suatu tempat. Masyarakat dapat mengetahuinya tanpa paksaan tentang berbagai isu mutakhir yang menjadi perhatian mereka. Peran yang sangat berharga dan penyediaan berbagai gagasan segar ini barangkali adalah merupakan suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat yang diberikan oleh perpustakaan dan tidak dapat dipenuhi jenis institusi lain. Melalui perpustakaan masyarakat dapat memberdayakan diri mereka sendiri dengan memperoleh berbagai informasi yang sesuai dengan dengan kebutuhan profesinya dan bidang tugas masing-masing. Ruang publik tidak terlepas dari gagasan yang diusung oleh seorang filsuf ternama di Jerman yaitu Jurgen Habermas. Gagasan tentang Ruang publik merupakan sebuah gagasan yang dipopulerkannya, bahwa ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan. Sebagaimana yang tergambar di Inggris dan Prancis, masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan. Ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan sangat relevan dengan peran perpustakaan sebagai media komunikasi antara pengarang melalui buku atau hasil tulisannya dengan pembaca. Dengan kata lain perpustakaan merupakan salah satu media komunikasi sebagaimana yang diungkapkan Habermas mengenai Ruang publik.

Kata Kunci : *Perpustakaan Umum, Ruang Publik, Jurgen Habermas.*

PENDAHULUAN

Sejak zaman raja Ashurbanipal, semua kawula kerajaan. Pada zaman Yunani, penguasa Athena bernama Peisistratus (sekitar tahun 600-528 SM) perpustakaan dinyatakan terbuka untuk



serta kaisar Agustus (63 SM-14) dari kerajaan Romawi membuka perpustakaan yang terbuka untuk umum. Malahan seorang ilmuwan roma bernama Plinius menyatakan menjadikan bakat manusia dan kekuatan mental sebagai milik umum. Kedua kekuatan itu dituangkan dalam bentuk buku yang disimpan diperpustakaan (Sulistyo- Basuki, 1991).

Pada zaman modern prinsip bahwa perpustakaan terbuka untuk umum baru berkembang dengan mulai dibukanya perpustakaan umum. Ini baru terjadi sekitar abad ke-19. Karena prinsip terbuka bagi umum ini, UNESCO mengeluarkan manifesto perpustakaan umum pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa perpustakaan harus terbuka bagi semua anggota masyarakat dengan tidak memandang perbedaan usia, kelamin, pekerjaan, keyakinan, warna kulit maupun agama.

Membincangkan tentang ruang publik tidak terlepas dari gagasan yang diusung oleh seorang filsuf ternama di Jerman yaitu Jurgen Habermas. Gagasan tentang Ruang publik merupakan sebuah gagasan yang dipopulerkannya melalui buku yang berjudul *Struktur wandel der Öffentlichkeit; Untersuchungen zu einer Kategorie der Bürgerlichen Gesellschaft*. Edisi bahasa Inggris buku ini, *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, diterbitkan pada 1989.

Jurgen Habermas memaparkan bagaimana sejarah dan sosiologi ruang publik melalui bukunya tersebut dan buku *civil society*. Menurutnya, ruang publik di Inggris dan Prancis sudah tercipta sejak abad ke 18. Pada zaman tersebut di Inggris orang biasa berkumpul untuk berdiskusi secara tidak formal di warung-warung kopi (coffee houses). Mereka di sana biasa mendiskusikan persoalan-persoalan karya seni dan tradisi baca tulis. Dan sering pula terjadi diskusi-diskusi ini melebar ke perdebatan ekonomi dan politik. Sementara di Prancis, contoh yang

diberikan Jurgen Habermas, perdebatan-perdebatan semacam ini biasa terjadi di salon-salon. Warga-warga Prancis biasa mendiskusikan buku-buku, karya-karya seni baik berupa lukisan atau musik di sana.

Selanjutnya Jurgen Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan. Sebagaimana yang tergambarkan di Inggris dan Prancis, masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan. Dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis maka akan terbentuk apa yang disebut dengan masyarakat madani. Secara sederhana masyarakat madani bisa dipahami sebagai masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan, yang dalam teori dipertentangkan dengan konsep negara yang bersifat memaksa. Dalam perkembangannya Ruang publik dimana proses komunikasi menyangkut ruang yang bersifat fisik seperti lapangan, warung-warung kopi dan salon dan juga yang bersifat non fisik seperti media massa.

Menurut hemat penulis, dari definisi ruang publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas bahwa ruang publik merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan ini relevan dengan peran perpustakaan sebagai media komunikasi antara pengarang melalui buku atau hasil tulisannya dengan pembaca yang bertujuan mendapatkan informasi atau juga atau juga antara pembaca dengan pembaca dalam mendiskusikan tentang sebuah buku yang terbitkan. Dengan kata lain perpustakaan merupakan salah satu media komunikasi sebagaimana yang diungkapkan Habermas mengenai Ruang publik.

Pedoman Umum Penyelenggaraan perpustakaan umum (2005) mengatur

bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan dipemukiman penduduk (kota atau desa) diperuntukkan bagi semua lapisan dan golongan masyarakat penduduk pemukiman tersebut untuk melayani kebutuhannya akan informasi dan bahan bacaan.

Selanjutnya pengertian perpustakaan umum menurut Badan Standarisasi Nasional perpustakaan umum adalah perpustakaan yang kegiatannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kotamadya yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan diwilayah kabupaten atau kotamadya serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

Perpustakaan umum yang didukung beberapa peraturan pemerintah dan UNESCO merupakan salah satu sarana penunjang pembelajaran seumur hidup bagi masyarakat, sekaligus melayani dan menyediakan akses informasi dan pengetahuan yang mudah dan cepat bagi masyarakat luas disamping menjadi agen kebudayaan (Laksmi, 2011). Ini membuktikan persamaan konsep perpustakaan dengan konsep ruang publik sebagaimana di ungkapkan diatas disebutkan bahwa perpustakaan merupakan wadah perjuangan melawan kebodohan dan ketertinggalan pengetahuan. Perpustakaan umum merupakan wadah pendidikan informal sepanjang hidup untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan menurut IFLA, khususnya yang mencakup perpustakaan kelurahan dan pemukiman/satelit, adalah perpustakaan yang didirikan oleh badan pemerintah pusat maupun daerah atau oleh organisasi lain dan terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya tanpa diskriminasi (Laksmi, 2011). Dari pernyataan ini relevan dengan konsep

aksesibilitas dan kesamarataan di perpustakaan informasi terbuka untuk umum tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin dan pendidikan. Masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pemanfaatannya.

UNESCO Public Library Manifesto (1994) menyebutkan bahwa perpustakaan umum merupakan pusat informasi lokal yang bertujuan agar semua jenis pengetahuan dan informasi mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum. Tujuan utama pendiriannya adalah menciptakan kebiasaan dan kegemaran membaca pada anak-anak sedini mungkin, menunjang kegiatan belajar masyarakat baik formal maupun informal, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas, bertindak selaku agen kultural atau sebagai pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya, mendukung pemberantasan buta huruf untuk semua umur.

Sedangkan Sutarno (2003) mengungkapkan bahwa perpustakaan umum ditengah masyarakat adalah otak/pikiran masyarakat, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan, membantu masyarakat menjadi individu yang seimbang, terintegrasi, berguna dan bertanggung jawab. Oleh karena itu perpustakaan jenis ini biasanya juga disebut Universitas Rakyat atau Universitas Masyarakat.

Secara umum tujuan didirikannya perpustakaan umum adalah memberikan kesempatan bagi umum untuk memanfaatkan bahan pustaka atau sumber informasi yang dimiliki perpustakaan, untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. dalam panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (1992) dinyatakan bahwa tujuan perpustakaan umum di rinci ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu tujuan umum, tujuan fungsional, tujuan operasional. Didalam ketiga tujuan tersebut salah satu poin penting yaitu mengembangkan

kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah, bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan umum merupakan ruangan yang demokratis sebagai wadah masyarakat ikut berperan dalam pembangunan nasional..

Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan perpustakaan umum dari perseptif ilmu sosial ini dengan alasan ilmu informasi dan perpustakaan bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Seperti yang di kemukakan oleh Umi Rodliyah (Rodlyah, 2017) bahwa ilmu informasi dan perpustakaan merupakan kajian interdisipliner terhadap informasi yang sangat berdekatan dan saling berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu diantaranya psikologi, komunikasi, sosiologi, statistik, linguistic, sibernetika, ilmu organisasi, komputer, ekonomi politik dan kebijakan publik.

Pendapat tersebut diangkat karena adanya kedekatan dan kesamaan konsep diantara ruang publik yang digambarkan habermas dan perpustakaan yang dikemukakan oleh Sumaryanto (2010) dalam tesisnya yaitu:

- a. Keduanya mengandaikan fungsi sebagai wadah perjuangan. Ruang publik sebagai wadah perjuangan melawan himpitan kekuasaan, sedangkan perpustakaan sebagai wadah perjuangan melawan kebodohan dan ketertinggalan pengetahuan.
- b. Keduanya memiliki unsur khas: aksesibilitas, kesamarataan, independensi, diskursus.
- c. Keduanya mengalami transformasi. Dalam ruang publik borjuis menjadi distorsi, refeodalisasi, pembusukan sedangkan dalam dunia perpustakaan terjadi komersialisasi (distorsi dari

fungsinya semula), pembusukan terhadap perannya yang ideal.

Menurut sumaryanto ketiga hal tersebut diatas memungkinkan perpustakaan umum dikaji dengan menggunakan perspektif ruang publik.

Sumaryanto (2010) dalam Tesisnya juga menjelaskan bahwa Ruang publik dan kepublikan perpustakaan dapat dikenali dari ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Ruang publik merupakan wilayah sosial yang bebas dari adanya sensor dan dominasi. Semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh memasuki ruang tersebut. Mereka sebetulnya adalah pribadi-pribadi. Bukan orang dengan kepentingan bisnis dan professional. Bukan pejabat atau politikus, tetapi percakapan mereka membentuk suatu publik, sebab bukan soal-soal pribadi mereka yang diperbincangkan, melainkan soal-soal kepentingan umum, yang dibicarakan tanpa paksaan. Dalam situasi ini individu-individu berlaku sebagai publik, sebab mereka memiliki jaminan untuk berkumpul dan berserikat dan menyatakan serta menyampaikan di depan umum pendapat-pendapat yang mereka miliki secara bebas dan tanpa tekanan.
- b. Ruang publik berfungsi sebagai tempat yang independen dari pemerintah (meskipun pendanaannya berasal dari pemerintah) dan yang otonom dari partisan kekuatan ekonomi tertentu, didedikasikan pada pada debat rasional (yang tidak diarahkan demi kepentingan tertentu, disamakan atau dimanipulasi) dan terbuka bagi siapa saja serta terbuka untuk

- diinspeksi masyarakat. dalam ranah publik inilah opini dibentuk.
- c. Ruang publik merupakan ruang penciptaan opini non pemerintah (*sphere of non governmental opinion-making*) sebuah ruang abstrak maupun ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota-anggota masyarakat diluar kendali pemerintah. Konsep ruang publik ini menganggap bahwa pemerintah bukan satu-satunya pihak yang dapat memonopoli kebenaran atau pengambilan keputusan. Secara idealnya, sebuah masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk berdebat, bersepakat, dan berkeputusan tentang hal-hal penting yang menyangkut diri mereka. Pemerintah lalu tinggal melaksanakan saja keputusan masyarakat tersebut. Konsepsi perpustakaan semestinya sejalan dengan konsepsi ruang publik.
 - d. Perpustakaan Umum semestinya merupakan bentuk ideal dari ruang publik karena dalam suatu perpustakaan umum terdapat ruang fisik perpustakaan yang terbuka untuk umum, mrenjadi tempat bagi semua orang untuk membaca berdiskusi dan mengambil keputusan tentang berbagai hal.
 - e. Ruang publik merupakan jembatan yang menghubungkan antara kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan Negara. Ruang publik terdiri dari organ-organ penyedia informasi dan perdebatan politisi seperti surat kabar dan jurnal.
 - f. Informasi merupakan bagian paling utama dari ruang publik. Dalam ruang publik orang secara eksplisit menjelaskan posisinya melalui argumentasi dan pandangan mereka diumumkan ke publik secara luas sehingga publik dapat memiliki akses penuh. Perlu dicatat disinipera media komunikasi dan institusi informasi seperti perpustakaan dan lembaga statistik (Webster, 1995).
 - g. Ruang publik yang ideal adalah seperti ketika kita membayangkan para anggota dewan yang terbuka dan jujur sedang berdebat tentang kasus-kasus dimasyarakat di ruang siding didukung dengan informasi memadai yang disiapkan antara lain oleh pustakawan yang berdedikasi dan tidak berpihak kepada salah satu partisan, semuanya transparan bagi masyaarakat karna dukungan publikasi yang bertanggungjawab dan infrastruktur pers yang disiapkan guna melaporkan secara tekun dan seksama apa yang sedang terjadi.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji peran perpustakaan umun sebagai ruang publik dan menelaah kepublikannya dari perspektif *Public Sphere* Jurgen Hubermas

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yaitu mengumpulkan data atau karya tulis

ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan perpustakaan yang relevan. studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Informasi - Perpustakaan

Menurut Laugu (2015) bahwa karya dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan, baik berupa kajian refleksi maupun karya penelitian, yang mencoba mengaitkan teori sosial kritis masih tergolong langka, bahkan dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan ahli atau pemerhati perpustakaan masih asyik dengan kajian yang bersifat positivistik-kuantitatif yang hasilnya hanya bersifat evaluatif dan teknis. Dalam penelitian ini akan diuraikan sejumlah topic kajian mengenai kepustakawanan yang menggunakan teori sosial kritis yang kemungkinan bisa menjadi landasan teoritis bagi penelitian ini.

Kajian pertama oleh Richard Miller dalam Laugu (2015) menggambarkan konsepsi dominan dari pengetahuan ilmiah dikenal dengan istilah positivism yang mengatakan bahwa semua prihal berada di bawah hukum umum (*general law*) sehingga, menurutnya setiap kebenaran suatu peristiwa harus mengandung karakteristik umum dari suatu situasi yang menyebabkan peristiwa tersebut dan mengikuti hukum empiris yang bersifat umum.

Oleh karena itu pandangan positivistic ini membentuk peran perpustakaan dalam dua idealisme, yaitu akses dan netralitas. Idealism akses merupakan esensi yang harus diwujudkan oleh perpustakaan yang bertujuan menyediakan kumpulan informasi dan pengetahuan yang terorganisir untuk memberikan akses fisik, bibliografik, dan intelektual kepada masyarakat pengguna. Secara ideal, perpustakaan tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam konten kumpulan informasi dan pengetahuan tersebut. Ia tidak membedakan kebenaran, objektivitas, dan nilai yang terkandung di dalamnya, tetapi dia hanya berkepentingan membuat kumpulan informasi dan pengetahuan tersebut agar tersedia bagi penggunaannya. Jesshe Shera sistem yang didesain untuk memelihara dan memfasilitasi penggunaan informasi. adapun idealisme *kedua*, yaitu netralitas, merupakan esensi tugas perpustakaan sebagaimana, menurutnya, prinsip sains yang harus netral. Oleh karena itu, bagi Jhon Buschman dan Michael Carbone dalam keidealan netralitas semacam itu, perpustakaan harus melayani hak dan kepentingan orang melalui netralitas jasa dan koleksi yang disediakan.

Pandangan positivistic tersebut telah meresap lama dalam pengalaman panjang praktik dan kajian perpustakaan dan kepustakawanan sehingga upaya keluar dari kotak positivistik semacam itu membutuhkan sebuah proses yang relative lama dan pekerjaan yang juga relative berat. Meskipun sudah dilakukan upaya melampaui batas-batas pandangan positivistic tersebut masih tetap berada pada proses yang agak lamban.

Secara historis, semua lembaga berupaya melegitimasi versi pengetahuan dan kebenaran terkini dengan mengawasi cara teks diatur satu satu sama lainnya. Klaim pengetahuan ilmiah berpijak pada dukungan kelembagaan yang diperkuat oleh keseluruhan strata praktik seperti sistem buku, penerbitan, dan

perpustakaan. perpustakaan sebagai lembaga untuk mengatur teks, menjadi satu komponen dalam legitimasi tatanan wacana tertentu. Ia memperkuat sekelompok aturan yang sesuai dengan kebenaran dan kepalsuan yang dipisahkan. Oleh karena itu perpustakaan oleh Umberto Eco dapat dikonseptualisasi sebagai labirin teks yang berisi banyak kemungkinan untuk pengaturan baru pada koleksi perpustakaan yang bukan hanya seperti yang diatur dan dipaksakan oleh perpustakaan tersebut. Kemungkinan itu disebut sebagai fantasi oleh Foucault dan dalam konteks ini perpustakaan biasanya diposisikan sebagai sesuatu yang berlawanan dengan sistem organisasi yang diterapkan oleh perpustakaan secara kaku.

Perpustakaan sebagai situs merepresentasikan berbagai kemungkinan pertarungan yang tergambar dalam pendekatan Foucault diatas dapat dilihat secara jelas dalam kaitannya dengan kekuasaan yang beroperasi di perpustakaan pada masa sebelum masehi sebagaimana dalam tulisan Erskine berjudul *Culture And Power In Ptolemaic Egypt: The Museum And Library Of Alexandria*, ia menunjukkan bahwa perpustakaan sebagai lembaga yang berkiprah dan menentukan sejarah kehidupan intelektual masyarakat, terutama para pemegang kekuasaan, seperti para raja dan pembantu-pembantunya, secara otomatis menempatkan perpustakaan sebagai lembaga yang memuat dan memainkan ideologi dan kebijakan yang bersifat politis. Asumsi ini dibangun berdasarkan temuan pada sejarah perkembangan intelektual mesir awal ketika ia menghubungkan perkembangan kebudayaan dan intelektual yang dimotori oleh Aristoteles sebagai guru para raja mesir dengan pengelolaan perpustakaan yang berawal dari masa Alexander muda. Dalam penelusuran ini perpustakaan ditentukan sebagai produk intelektual yang

mengandung kompetisi di kalangan para pengganti Alexander, seperti prolemy, yang kemudian menjadikannya sebagai lembaga penyebar ideologi bagi mereka yang terlibat dalam kekuasaan yang salah satunya melalui proses preservasi informasi tentang hubungan silsilah keluarga kerajaan. Hubungan silsilah keluarga alexander dengan Ptolemy sebagai pewaris sah kerajaan mesir dipublikasikan untuk untuk memperkuat kedudukan ptolemy dalam kepemimpinannya dimesir pada saat itu. Publikasi ini memberikan pengaruh ideologis kepada masyarakat untuk mendukung kekuasaan keluarga ptolemy sebagai pewaris tahta Alexander secara turun temurun. Fungsi perpustakaan dalam kaitan ini bukan saja membantu memberikan kaitan politik dan dinasti dengan Alexander, melainkan juga memberikan kepada masyarakat yunani di mesir sebuah kaitan budaya dengan masa lalu ke-Yunaniannya. Kajian ini memberikan petunjuk bahwa eksistensi perpustakaan bukan sekedar bekerja murni untuk pengetahuan, melainkan juga mengandung banyak tujuan lain, seperti relasi budaya, politik, ideologis dan kekuatan.

Kajian serupa di tulis oleh glynn (2005) berjudul *The New York Society Library: Books, authority, and Publics in Colonial and Early Republican New York*, yang mengungkapkan bahwa perpustakaan masyarakat New York yang didirikan pada tahun 1754 telah dilibatkan dalam praktik politik oleh faksi yang bertarung untuk mencapai dominasi mereka. Oleh karena itu, koleksi yang dimiliki dan dikembangkan sarat ideologis sebagai upaya mendapatkan dukungan masyarakat karena perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan pada saat itu telah mendapatkan tempat di masyarakat sebagai ruang untuk mendapatkan bacaan yang lengkap. Dinamika ideologisasi perpustakaan pada saat itu menjadi saluran oleh pelaku

utama ideology New York untuk menggerakkan masyarakatnya, baik dalam politik maupun keagamaan. Oleh karena itu, sejarah perpustakaan masyarakat New York sepanjang tahun 1840-an dianggap sebagai babak penting dalam pengembangan masyarakat Amerika sebagai masyarakat modern dan liberal seperti saat ini.

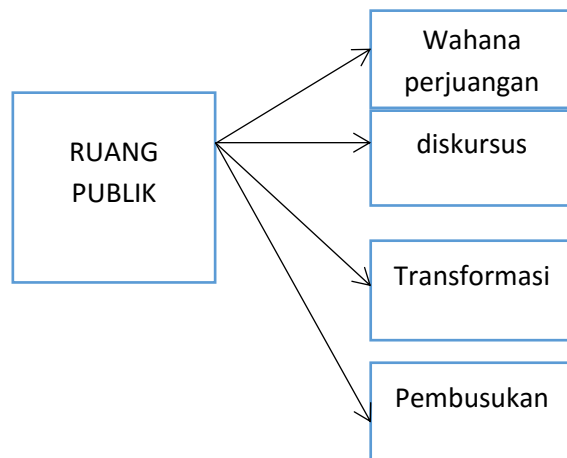
Jhon E. Buschman (2003) dalam karyanya yang berjudul *dismantling the public sphere: situating and sustaining librarianship in the age of the public philosophy*. Ia melihat bahwa dunia perpustakaan menghadapi krisis budaya yang harus dibongkar. Krisis budaya dimaksud adalah ketertinggalan kajian perpustakaan karena keterbatasan pisau teoritiknya,, disamping keengganannya menggunakan pendekatan lain yang bersifat kritis. Oleh Karena itu ia mengajukan sebuah pengkajian yang bersifat filosofis yang mengacu pada teori kritis, seperti Habermas, untuk menemukan dan membongkar penyebab utama krisis tersebut. Upaya ini merupakan sebuah pembelaan terhadap perpustakaan dan kepustakawanan dalam rangka mendukung perpustakaan sebagai wahana penting untuk menciptakan akses informasi yang demokratis. Perjuangan untuk mencapai taraf demokratis dalam pengelolaan perpustakaan membutuhkan sebuah pendekatan yang multidisiplin untuk mengungkap persoalan-persoalan yang membatasi penelitian perpustakaan dan kepustakawanan pada taraf teknis dan manajerial.

Pada tataran itu, ia mengajukan pembahasannya dalam dua bagian, yaitu *pertama*, kerangka analitis tentang filsafat publik baru dan ruang publik; dan *kedua*, kajian spesifik tentang perpustakaan dan pembongkaran ruang publik. Bagian pertama merupakan upaya membaca perpustakaan dalam bingkai budaya melalui tiga fokus perhatian. *Pertama*. Perpustakaan telah dianggapnya telah mengalami krisis budaya karena kajiannya

telah mengalami kepakuman akibat terbatasnya pendekatan yang digunakan dalam membaca fenomena perpustakaan dan kepustakawanan sehingga upaya sehingga keluar dari krisis tidak lain adalah pendekatan kajian yang multidisiplin. Fokus *kedua* berkaitan dengan pendekatan filsafat publik baru yang dapat melahirkan analisis kritis terhadap perpustakaan sebagai lembaga budaya publik yang selama ini terabaikan. Fokus *ketiga* adalah keinginan untuk membaca perpustakaan sebagai ruang publik yang menjadi ruang lahirnya komunikasi demokrasi antar anggota masyarakat, dalam hal ini pemustaka.

KONSEPSI RUANG PUBLIK JURGEN HABERMAS

Penulis ini menggunakan teori Public Sphere Jurgen Habermas sebagai pijakan untuk menganalisis peran perpustakaan umum kota Yogyakarta sebagai ruang publik.



Gambar 1: Ruang Publik Jurgen Habermas

- a. Ruang publik dipahami sebagai wahana perjuangan kaum borjuis melawan otoritas penguasa. Ini identic dengan perpustakaan sebagai wahana perjuangan melawan kebodohan dan perannya dalam pencerahan masyarakat, penyebaran keadilan dan kebenaran.

- b. Ruang publik mengedepankan diskursus sebagai prosedur mencapai opini publik. Prinsip diskursus di perpustakaan terjadi antara pengguna dan pustakawan misalnya dalam menentukan bahan perpustakaan yang harus dibeli. Antara pengguna dan penyensor dalam upaya menemukan consensus mengenai bahan-bahan yang disensor; antara sesama pengguna misalnya dalam acara diskusi, bedah buku dan sebagainya; dan juga diskursus antara pengguna dan penulis yang sekaligus membuat pendapat dan opini yang dituliskan dalam suatu buku yang sifatnya masih subjektif menjadi lebih publik dan ditanggapi oleh pembacanya.
- c. Transformasi yang terjadi di ruang publik borjuis (depolitisasi, refeodalisasi, pembusukan) analog dengan perubahan layanan perpustakaan (yang menunjukkan kecenderungan ke komersialisasi, otorisasi penuh pustakawan/pemerintah di dalam menentukan arah layanan, dan pembusukan layanan)
- d. Pembusukan terhadap ruang publik ideal terjadi melalui lobi-lobi dan kerja humas yang merupakan lonceng kematian bagi ruang publik ideal analog pembusukan layanan perpustakaan yang juga dilakukan melalui lobi-lobi dan kerja humas meluluhlantahkan layanan perpustakaan dalam pengertian yang ideal.

Konsepsi pemikiran habermas mengenai ruang publik tertuang dalam karyanya yang berjudul *The Struvtural Transformation Of The Publik Sphere: An Inquiry Into A Category Of Bourgeois Society* (1989), yang merupakan karya terjemahan dari yang diterbitkan dalam bahasa jerman tahun 1962. Secara ringkas

dapat dikatakan ada dua tema pokok yang dikemukakan Habermas dalam buku tersebut yakni pertama, analisisnya mengenai asal mula ruang publik borjuis; kedua, perubahan structural ruang publik di zaman modern di tandai dengan bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, dan makin kuatnya posisi organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan publik, pada analisis yang kedua tersebut organisasi ekonomi besar dan institusi pemerintah mengambil alih ruang publik, sementara warga Negara cukup senang menjadi konsumen barang, jasa, administrasi politik dan tontonan publik

Alan Mckee dalam Qamariyah dan Rahmi (2017) menjelaskan bahwa Jurgen Habermas pencetus utama gagasan ruang publik (public sphere), mendefinisikan ruang publik sebagai berikut: *"a domain of our social life where such a thing as public opinion can be formed (where) citizens...deal with matters of general interest without being subject to coercion...(to express and publicize their views)"*.

Ruang publik borjuis dipahami sebagai ruang orang-orang privat yang berkumpul sebagai publik *"the sphere of private people come together as a public"*. Ruang publik terjadi karena orang-orang privat berkumpul sebagai sebuah publik dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat kepada Negara (Habermas, 1991).. Habermas menelusuri sejarah pembagian antara yang public dan yang privat dalam bahasa dan filsafat.

Ruang publik borjuis yang muncul di awal abad ke-18 menurut habermas berfungsi sebagai mediasi antara urusan privat individu di dalam kehidupan keluarga, ekonomi, kehidupan sosial dilawankan dengan tuntutan dan urusan kehidupan sosial dan publik. Ini juga mencakup mediasi kontradiksi antara kepentingan borjuis di satu pihak dan kepentingan warga Negara lainnya di lain

pihak. Tujuannya adalah mengatasi kepentingan dan opini privat guna menemukan kepentingan bersama dan mencapai consensus sosial.

Ruang publik terdiri atas organ informasi dan debat politik seperti surat kabar, jurnal, dan institusi-institusi diskusi politik seperti parlemen, klub politik, salon-salon kesusastaan, pertemuan-pertemuan umum, rumah minum dan kedai kopi, ruang-ruang pertemuan, dan ruang publik lainnya dimana terjadi diskusi sosial-politik. Di tempat-tempat tersebut, kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politik di junjung tinggi. Kepublikan yang terjadi dalam ruang publik dengan sendirinya mengandung daya kritis terhadap proses-proses pengambilan keputusan yang tidak bersifat publik.

Perpustakaan Umum

Menurut Sulistyono- Basuki (1991) Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan tujuan melayani umum. Ciri-ciri perpustakaan umum adalah sebagai berikut:

1. Terbuka untuk umum artinya terbuka bagi siapa saja tanpa memandang tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, kepercayaan, ras, usia, pandangan politik, dan pekerjaan.
2. Dibiayai oleh dana umum. Dana umum adalah dana yang berasal dari masyarakat. biasanya dikumpulkan melalui pajak dan dikelola oleh pemerintah. Dana ini kemudian digunakan untuk mengelola perpustakaan. karena dana berasal dari umum maka perpustakaan umum harus terbuka untuk umum.
3. Jasa yang diberikan pada hakekatnya bersifat Cuma-Cuma. Jasa yang diberikan mencakup jasa referensi artinya jasa memberikan informasi, peminjaman,

konsultasistadi sedangkan keanggotaan bersifat Cuma-Cuma artinya tidak perlu membayar. Pada beberapa perpustakaan umum di Indonesia masih ada yang memungut biaya untuk menjadi anggota, namun hal ini semata-mata karena administrasi belak, bukanlah prinsip utama.

Perpustakaan amat penting bagi kehidupan kultural dan kecerdasan bangsa, karena perpustakaan umum merupakan satu-satunya pranata kepustakawanan yang dapat diraih umum. Demikian pentingnya peranan perpustakaan umum bagi kecerdasan bangsa sehingga UNESCO mengeluarkan manifesto perpustakaan pada tahun 1972. Adapun *Manifesto Perpustakaan Umum* Unesco menyatakan bahwa perpustakaan umum mempunyai 4 tujuan utama yaitu:

1. Memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah yang lebih lebih baik.
2. Menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat, terutama informasi mengenai topik yang berguna bagi mereka sedang hangat dalam kalangan masyarakat.
3. Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sejauh kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan bantuan bahan pustaka. Fungsi ini sering disebut sebagai pendidikan perpustakaan umum, lebih tepat pendidikan berkesinambungan ataupun pendidikan seumur hidup. Pendidikan sejenis ini hanya dapat dilakukan oleh perpustakaan umum karena perpustakaan umum merupakan satu-satunya pranata

kepastakawanan yang terbuka untuk umum. Perpustakaan nasional juga terbuka untuk umum namun untuk memanfaatkannya tidak selalu terbuka langsung bagi perorangan, adakalanya harus melalui perpustakaan lain.

4. Bertindak sebagai agen kultural artinya perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Perpustakaan umum bertugas menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat sekitar dengan cara menyelenggarakan pameran budaya, ceramah, pemutaran film, dan penyediaan informasi yang dapat meningkatkan keikutsertaan, kegemaran dan apresiasi masyarakat terhadap segala bentuk seni budaya.

Ruang Publik dan Perpustakaan

Berbagai komentar tentang informasi dari sejumlah pakar yang sempat dicatat Frank Webster (1995) antara lain berisi bahwa informasi zaman sekarang ini cenderung ternodai. Tidak terlepas dari campur tangan pihak yang menyajikannya atau yang mengemasnya sedemikian rupa untuk mendukung suatu posisi, atau memanipulasinya untuk tujuan tertentu. Atau membuatnya menjadi komoditas yang laku dijual. Yang sifatnya menghibur. Dalam versinya yang paling ekstrim, keadaan diatas dapat dianggap sebagai rusaknya proses demokratisasi akibat tidak memadainya informasi yang disuguhkan kepada publik karena apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang handal lalu akan sulit tercapai masyarakat yang ideal, cerdas, arif dan berpengetahuan luas – demokrasi dalam pengertian sejati.

Perpustakaan umum dilihat dengan memakai perspektif Ruang Publik (*public sphere*) yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan umum sebagai wahana belajar. Ruang publik borjuis seperti

digambarkan dalam buku *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, merupakan suatu arena yang independen dan otonom, yang mengangkat debat rasional sebagai prosedur untuk menghasilkan opini publik, suatu ruang yang terbuka yang dapat diakses dan diamati masyarakat luas. Ruang publik seperti ini dilatar belakangi oleh perjuangan para pengusaha kapitalis guna melepaskan ketergantungannya dari gereja dan Negara. Sejalan dengan perjuangan seperti yang tergambar di ruang publik tersebut, perpustakaan umum didirikan sebagai wahana belajar seumur hidup bagi pengguna, suatu usaha membebaskan diri dari ketidaktahuan dan segala dampak yang muncul sebagai akibatnya. Untuk dapat menjadi wahana belajar yang memadai segala potensi perpustakaan harus diarahkan demi kemudahan pengguna untuk melaksanakan kegiatan belajar. Dengan menggunakan perspektif ruang publik,

1. Sifatnya yang independen, baik terhadap pemerintah maupun kekuatan-kekuatan lainnya. Independen memungkinkan perpustakaan menyusun program-programnya yang murni untuk kepentingan perpustakaan tanpa terlalu banyak mendapatkan campur tangan pihak lain termasuk pihak pemberi dan.
2. Menjadikan perpustakaan sebagai wahana publikasi pemikiran maupun pandangan yang sebelumnya masuk bersifat subyektif yaitu melalui diskursus di perpustakaan. perpustakaan menempatkan bahan perpustakaan di rak untuk dibaca, ditanggapi, dijadikan bahan diskusi dan sebagai kegiatan mengkonstruksi pengetahuan baru. Di perpustakaan diskursus dapat terjadi dalam dua bentuk yakni diskursus langsung

antar para pengguna perpustakaan misalnya dalam bentuk diskusi, acara bedah buku dan diskursus tidak langsung misalnya ketika pengguna membaca buku di perpustakaan kemudian menanggapi dengan tulisan yang berkaitan dengan bahan yang dibacanya.

3. Kesiapan pengguna perpustakaan dan pustakawan untuk merasionalkan kebijakan-kebijakan, praktik-praktik layanan yang ada selama ini dan menjadikan kepentingan pengguna sebagai hal utama. Perpustakaan perlu menyerap, dan mempertimbangkan dan memenuhi masukan, kritikan dari masyarakat dan memenuhi tuntutan akuntabilitas public. Menanggapi secara positif masukan dan kritikan dari pengguna merupakan salah satu cara perpustakaan umum lebih mendekatkan dirinya dengan keinginan penggunaannya seperti contoh dalam kegiatan akuisisi.

Peran Perpustakaan Umum dalam Pemberdayaan Masyarakat

Perpustakaan umum memainkan peranan penting yang unik didalam masyarakat industri netral, perpustakaan menyediakan sekaligus informasi dan perbedaan pandangan di suatu tempat dimana warga masyarakat dapat mengetahuinya tanpa paksaan tentang berbagai isu mutakhir yang menjadi perhatian mereka. Peran yang sangat berharga dan penyediaan berbagai gagasan segar ini barangkali adalah merupakan suatu pelayanan terhebat kepada warga masyarakat yang diberikan oleh perpustakaan yang tidak dapat dipenuhi jenis institusi lain. melalui perpustakaan warga masyarakat dapat memberdayakan diri mereka sendiri dengan memperoleh berbagai informasi

yang sesuai dengan dengan kebutuhan profesinya dan bidang tugas masing-masing, yang pada akhirnya bermuara pada tumbuhnya warga masyarakat yang terinformasi dengan baik, berkualitas dan demokratis. UNESCO di dalam Public Library Manifesto-nya pada tahun 1994 menyebutkan bahwa perpustakaan umum merupakan gerbang pengetahuan lokal yang menyediakan suatu kondisi dasar untuk belajar sepanjang hayat, pengambilan keputusan independen dan pengembangan budaya baik perorangan maupun kelompok masyarakat. hal ini menggambarkan bahwa perpustakaan umum merupakan wadah perjuangan membebaskan masyarakat dari kebodohan dengan perannya sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat dalam bahasa inggris disebut dengan *long life education*, seyogyanya perpustakaan umum mampu mengasup ilmu kepada masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan di dunia pendidikan formal. Perpustakaan umum merupakan lembaga independen dimana pemerintah tidak ikut campur tangan didalamnya.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah peran seperti itu sudah berjalan dan berkelanjutan. Hal ini belum bisa dijawab dengan pasti dikarenakan belum adanya penelitian yang dilakukan tentang hal itu baik untuk tingkat nasional maupun lokal. Tetapi secara umum perpustakaan umum dinegara Indonesia terutama yang dengan mudah terlihat di sejumlah kota besar pada dasarnya belum berkembang dengan memuaskan. Hal ini mudah diidentifikasi, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa warga masyarakat yang tidak pernah ke perpustakaan, dan bahkan banyak di antaranya tidak mengetahui letak atau lokasi perpustakaan umum di kota mereka. Dengan kata lain , perpustakaan kita mungkin tidak berhasil menarik perhatian warga masyarakat untuk mengunjunginya.

Keadaan ini diperkirakan terutama disebabkan oleh lemahnya manajemen perpustakaan umum, dimana para perpustakaan tidak membuat dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan tidak berupaya secara maksimal untuk mengangkat isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan umum ke permukaan sehingga menjadi perhatian publik dan para pengambil keputusan di tingkat lembaga induknya. Peran perpustakaan umum penting untuk dievaluasi implementasinya mengingat semakin bertambahnya penduduk miskin dinegara kita sebagai akibat dari krisis ekonomi yang kita alami. Menurunnya tingkat pendapatan anggota masyarakat memberikan implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan, dan yang paling mengkhawatirkan terutama dalam bidang pendidikan, dimana informasi dan pengetahuan akan semakin terasa mahal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Didukung dengan makin bermunculnya lembaga-lembaga penyedia informasi yang berorientasi komersial maka akan semakin memperlebar gap diantara masyarakat ekonomi menengah dan ekonomi bawah. Informasi dizaman sekarang memang sudah menjadi komoditas yang sangat unggul dalam percaturan ekonomi dan bisnis. Mereka yang memiliki dan menguasai informasi lebih unggul dalam penguasaan ekonominya dibandingkan dengan mereka yang tidak menguasainya.

Hal ini akan terlihat bahwa masyarakat yang tidak mampu mengadopsi informasi akan semakin terlindas oleh orang-orang yang menguasai informasi. seharusnya perpustakaan umum yang memiliki peran pelayanan informasi terbuka bagi masyarakatnya bisa dimanfaatkan atau menjembatani kesenjangan yang ada sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perpustakaan merupakan contoh lembaga yang paling baik untuk menggambarkan keterbukaan informasi,

terutama perpustakaan umum.¹ Perpustakaan sejak dulu telah melepaskan diri dari aspek-aspek komersial. Sifat perpustakaan umum adalah memberikan akses informasi secara bebas kepada segenap anggota masyarakat di semua tingkatan.

Perpustakaan sebagai tempat pendidikan seumur hidup

Fungsi utama dari perpustakaan umum adalah untuk membantu orang, terutama orang-orang muda dan anak-anak, menjadi melek informasi. dalam hal ini termasuk memberitahukan mereka bagaimana menemukan informasi, dan juga mengembangkan kebiasaan membaca. Perpustakaan umum membantu orang dewasa untuk belajar sepanjang hayat dan belajar kembali untuk perubahan karir. Perpustakaan umum juga berperan dalam memelihara dan mempromosikan kebudayaan.

Di Negara yang lebih maju, walaupun buku kaset video dan audio, CD dan bahan lainnya dengan harga terjangkau tersedia disudut kota, tetapi masyarakat masih tetap banyak berkunjung ke perpustakaan umum. Diinggris, pembelian buku terbesar adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum menjadi tempat bertemunya para warga kota dan melalui tempat ini mereka mengetahui banyak hal tentang kebijakan yang diambil oleh para pemimpin mereka, dan juga berbagai hal yang diperjuangkan oleh para wakil mereka diparlemen.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh University of Minnessota dan Gallup Organization di Amerika Serikat pada tahun 1994, menunjukkan bahwa peran perpustakaan umum dalam pendidikan semakin penting pada masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah dan berpenghasilan rendah. Peran utama perpustakaan umum tersebut diranking berdasarkan jawaban para responden,

¹ Pawit M. Yusup, Ilmu Informas, komunikasi, dan kepastakaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 361

sebagai berikut: (1) Sebagai pusat dukungan pendidikan bagi siswa semua umur (88%); (2) Sebagai pusat belajar bagi orang dewasa (85%); (3) Sebagai pusat belajar dan penemuan bagi anak-anak pra-sekolah (83%); (4) Sebagai pusat penelitian bagi ilmuwan dan peneliti (68%); (5) Sebagai suatu pusat untuk informasi masyarakat (66%); (6) Sebagai suatu pusat informasi untuk masyarakat bisnis (55%); (7) Sebagai suatu tempat yang menyenangkan untuk membaca, berfikir atau bekerja (52%); dan (8) Sebagai pusat membaca yang bersifat rekreasi (51%).

KESIMPULAN

Pada zaman modern prinsip bahwa perpustakaan terbuka untuk umum baru berkembang dengan mulai dibukanya perpustakaan umum. Ini baru terjadi sekitar abad ke-19. Karena prinsip terbuka bagi umum ini, UNESCO mengeluarkan manifesto perpustakaan umum pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa perpustakaan harus terbuka bagi semua anggota masyarakat dengan tidak memandang perbedaan usia, kelamin, pekerjaan, keyakinan, warna kulit maupun agama.

Membincangkan tentang ruang publik tidak terlepas dari gagasan yang diusung oleh seorang filsuf ternama di Jerman yaitu Jürgen Habermas. Gagasan tentang Ruang publik merupakan sebuah gagasan yang dipopulerkannya melalui buku yang

berjudul *Struktur wandel der Öffentlichkeit; Untersuchungen zu einer Kategorie der Bürgerlichen Gesellschaft*. Definisi ruang publik yang kemukakan oleh Jürgen Habermas bahwa ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan ini relevan dengan peran perpustakaan sebagai media komunikasi antara pengarang melalui buku atau hasil tulisannya dengan pembaca yang bertujuan mendapatkan informasi atau juga atau juga antara pembaca dengan pembaca dalam mendiskusikan tentang sebuah buku yang terbitkan.

Dengan kata lain perpustakaan merupakan salah satu media komunikasi sebagaimana yang diungkapkan Habermas mengenai Ruang publik. Fungsi utama dari perpustakaan umum adalah untuk membantu orang, terutama orang-orang muda dan anak-anak, menjadi melek informasi. Dalam hal ini termasuk memberitahukan mereka bagaimana menemukan informasi, dan juga mengembangkan kebiasaan membaca. Perpustakaan umum membantu orang dewasa untuk belajar sepanjang hayat dan belajar kembali untuk perubahan karir. Perpustakaan sejak dulu telah melepaskan diri dari aspek-aspek komersial. Sifat perpustakaan umum adalah memberikan akses informasi secara bebas kepada segenap anggota masyarakat di semua tingkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik Nur Qamariyah dan Lailatur Rahmi (2017). *Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam menciptakan Ruang Publik*. Perpustakaan ITS Surabaya: Pustakaloka, Volume 9 No.1, Juni.
- Frank Webster. (1995). *Theories of the information society*. London: Routledge.
- Jürgen Habermas (1991). *The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society*. Cambridge: MIT Press.
- Laksmi (2011). *Manajemen Lembaga Informasi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penaku.
- Nurdin Laugu. (2015). *Representasi Kuasa Dalam Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Gopernus Press.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2000). *Pedoman Umupenyelenggaraan Perpustakaan Umum*.



- Sulistyo Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarno (2003). *Seperempat Abad Perpustakaan Umum Pemerintahan Propinsi DKI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sulistyo Basuki (1991). *Pengantar Ilmu perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryanto. (2010). *Ruang Publik Jurgen Habermas Dan Tinjauan Atas Perpustakaan Umum Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ummi Rodliyah. (2017). *Reposisi Ilmu Informasi Perpustakaan*,
<http://pemasaran.wikispaces.com/file/view/reposisi+ilmu+informasi+dan+perpustakaan.pdf>



